

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING DI DESA TALAGA WARNA

Amelia Dwi Rahmawati¹, Elvina Novalianti Lala², Indah Nurmalasari³, Muhamad Mulhadi⁴, Nayla Dheanty⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ameliadr28@gmail.com, elvinalala21@gmail.com, indahnurmalasari555@gmail.com,
muhamadmuhadi6@gmail.com, nayladheanty2@gmail.com

Abstract

Stunting is a global issue of concern today so the government intensified Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. The stunting rate in Serang Regency fluctuated from 2021 to 2023. Directorate General of Regional Development shows that Talaga Warna in 2021 has a stunting prevalence of 3.6%, in 2022 it has a stunting prevalence of 5.2% and a stunting prevalence of 7.1% in 2023. The purpose of this study was to determine how the implementation of the Supplementary Feeding Program for stunting prevention in Talaga Warna Village. The research method used is descriptive qualitative through document analysis and interviews with the theory of the Van Metter Van Horn. The results showed that the characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, and existing resources were important factors in the successful implementation of the Supplementary Feeding Program. The success of the program is influenced by an understanding of policy objectives, effective coordination, and the ability to face social, economic, and political challenges. The implementation of the Supplementary Feeding Program provides good results so that the stunting rate in Talaga Warna Village decreases.

Keywords: Implementation, Stunting, Supplementary Feeding Program

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Stunting, juga dikenal sebagai kekerdilan, adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena infeksi bakteri, masalah sosial dan mental yang berlangsung lama, dan gangguan perut kronis. Stunting sebagian besar disebabkan oleh infeksi usus, tekanan psikologis dan sosial yang tidak terselesaikan, dan pertumbuhan usus yang tidak terkontrol pada anak, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Anak balita yang memiliki z-score di bawah -2.00 SD/Standar Deviasi (stunting) atau kurang dari -3.00 SD (stunting

berat) dianggap mengalami stunting, menurut Kementerian Kesehatan. Masalah gizi kronis yang dikenal sebagai stunting disebabkan oleh kurangnya asupan makanan dalam jangka waktu yang lama akibat pemberian makanan yang kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Sejak janin masih dalam kandungan, stunting dapat terjadi; biasanya muncul pada saat anak mencapai usia dua tahun.

Kondisi gizi yang dikenal sebagai stunting adalah tanda dari penyakit infeksi dan kekurangan gizi kronis yang berulang. Anak-anak yang menderita kekurangan gizi kronis dikatakan merasa “lapar” dalam waktu yang

lama. Jika ibu hamil tidak mengonsumsi makanan yang cukup, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi bayi dan anak untuk tumbuh dan berkembang, bahkan ketika mereka masih dalam kandungan. Selain itu, ada interaksi antara konsumsi makanan dan risiko infeksi menular. Stunting telah menarik lebih banyak perhatian akhir-akhir ini dibandingkan status gizi lainnya karena, selain lebih umum terjadi, stunting juga menunjukkan kondisi yang lebih serius daripada sekadar kekurangan berat badan (Achadi et al., 2020). Stunting pada masa kanak-kanak menyebabkan anak yang dilahirkan di masa depan memiliki berat badan lahir yang lebih kecil, tinggi badan dan penghasilan yang lebih pendek saat dewasa, serta menurunnya angka partisipasi sekolah. Saat dewasa, stunting juga dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh terganggu dan meningkatkan kerentanan terhadap kondisi jangka panjang seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker (Fikawati et al., 2017).

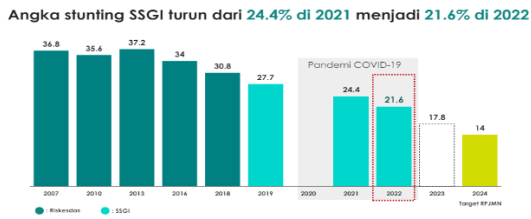
Departemen Kesehatan dan Pembangunan Indonesia (IDAHl) menyatakan bahwa stunting pada anak dapat disebabkan oleh dua sumber yang berbeda. Kedua sumber tersebut adalah faktor keturunan dan lingkungan. Pengaruh lingkungan mencakup hal-hal seperti kondisi sistem kekebalan tubuh ibu, tingkat infeksi pada anak, dan pola pemberian makan. Ada masalah perilaku manusia yang disebut stunting yang perlu ditangani saat ini. Badan Koordinasi Pembangunan Manusia dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia melaporkan bahwa, dari 154 negara yang memiliki data mengenai kondisi ini, Indonesia menempati peringkat ke-27 dan ke-5 tertinggi di Asia berdasarkan data dari UNICEF dan WHO. Kementerian Kesehatan mengungkapkan pada Januari 2023 bahwa prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN. Angka ini hampir mencapai puncak jika dibandingkan

dengan kriteria WHO yang menyatakan bahwa persentase stunting minimal 20%.

Dasar-dasar program percepatan penurunan stunting diantaranya Perpes No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020/2024, Perpes No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Surat Set Warpres No. B 470/KSNB/SWP/PKM.00/07/2021 tentang Pelaksanaan SSGI Tahun 2022, dan Surat Bappenas No.030007/PP.03.02/D.5/T/3/2022 mengenai Urgensi Pelaksanaan SSGI oleh Kemenkes. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting memuat kebijakan program percepatan stunting. Perpres ini mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kurang gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 mengatur, antara lain: 1) strategi nasional untuk menurunkan stunting secara lebih cepat; 2) cara penanganan percepatan; 3) cara mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting; 4) pengawasan, penilaian, dan pelaporan; dan 5) sumber daya pendanaan. Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021. Istilah “stunting” mengacu pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang terhambat sebagai akibat dari infeksi yang berkelanjutan dan kekurangan gizi kronis; tinggi atau panjang badan anak berada di bawah kisaran yang direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting 2021) (Hariyanti et al., 2022).

Gambar 1.1 Diagram Survei Status Gizi Indonesia 2022

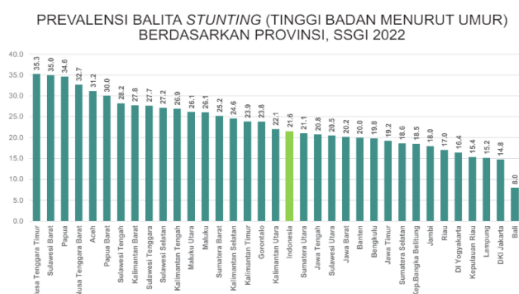


Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 Penurunan stunting ini terjadi selama pandemi, bukan pada waktu normal. Di masa normal tahun ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengantisipasi penurunan kasus stunting yang lebih akut lagi. Hal ini akan memungkinkan mereka mencapai target penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil data dari Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), tingkat prevalensi stunting di Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 24,5%, lalu pada tahun 2022 tingkat prevalensi stunting turun menjadi 20,0%, turun sebesar 4,5% dibandingkan pada tahun 2021.

Gambar 1.2 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi Tahun 2022



Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Berdasarkan data yang tertera pada gambar 1.2 pada tahun 2022 Provinsi Banten terdapat pada urutan ke 12 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Data tersebut menjelaskan bahwa tingkat prevalensi stunting yang terdapat

di Provinsi Banten sebesar 20.0%. Ini menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak di provinsi tersebut mengalami stunting. Meskipun tidak berada pada tingkat yang paling parah dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia, tingkat prevalensi stunting di Provinsi Banten masih cukup tinggi,

Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan data terkait monitoring pelaksanaan dan aksi 8 aksi konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi di Provinsi Banten dari tahun 2020 hingga 2023 yang dirangkum dalam tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Data Prevelensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Provinsi Banten

TAHUN	PREVELENSI
2023	4.0%
2022	6.8%
2021	6.7%
2020	4.9%

Sumber : aksibangda.kemendagri.co.id

Menurut data yang terdapat di dalam Tabel 1.1 Prevelensi Stunting di tahun 2023 mengalami situasi fluktuatif yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun yang dimana pada tahun 2022 sebesar 6.8% menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 4.0%. Banten terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 kota yang terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Berdasarkan data yang didapat dari aksi bangda kemendagri kasus stunting di Kabupaten Serang terus menurun namun pada tingkatan kota/kabupaten di Banten, Kabupaten Serang tetap menjadi daerah dengan tingkatan prevalensi stunting yang tertinggi. Berikut ini data yang menunjukkan tingkat prevalensi stunting di Kota/Kabupaten di Banten Tahun 2023.

Gambar 1.4 Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Banten Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA (ANAK)	STUNTING		PREVALENSI (%)
			PENDEK (ANAK)	SANGA T PENDEK (ANAK)	
1	Pandeglang	82,279	2,079	943	3.7
2	Lebak	108,199	3,222	1,117	4.0
3	Tangerang	247,821	6,779	2,224	3.6
4	Serang	127,441	5,948	3,432	7.4
5	Kota Tangerang	90,223	3,129	1,079	4.7
6	Kota Cilegon	92,811	823	321	3.5
7	Kota Serang	47,808	930	705	3.4
8	Kota Tangerang Selatan	114,207	707	226	0.8
TOTAL		850,690	23,617	10,048	4.0

Sumber : aksibangda.kemendagri.co.id

Dengan tingkat prevalensi 15-25%, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori zona stunting kuning. Dengan prevalensi 10-20%, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masuk ke dalam kategori zona stunting hijau. Sedangkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang masuk dalam zona stunting merah karena memiliki angka stunting tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 25-30%.

Tabel 1.2 Data Prevalensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Serang

TAHUN	PREVALENSI
2023	7.4%
2022	10.7%
2021	12.5%

Sumber : aksibangda.kemendagri.co.id

Berdasarkan data Tabel 1.2 Kabupaten Serang mengalami penurunan stunting dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 mencapai 7.4%. Pada tahun 2023 di Kabupaten Serang terdapat 326 desa yang tercatat memiliki kasus stunting salah satunya yaitu Desa Talaga Warna. Aksi Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah (Aksibangda) menunjukkan Desa Telaga Warna pada tahun 2021 memiliki 111 balita dengan Prevelensi stunting sebesar 3,6%, kemudian di tahun 2022 memiliki 115 balita dan prevelensi stuntingnya sebesar 5,2% dan di tahun 2023 memiliki 118 balita prevelensi stuntingnya sebesar 7,1% jumlah balita meningkat namun angka stuntingnya juga meningkat.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kejadian stunting di Indonesia adalah dengan meningkatkan gizi anak melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Di Kabupaten Serang, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telah berjalan cukup lama, khususnya di Kecamatan Pabuaran. Sebagai bagian dari Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), balita diberikan makanan yang dapat meningkatkan gizi mereka di samping kegiatan-kegiatan lain yang membahas masalah kualitas dan keamanan pangan. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), menurut Kementerian Kesehatan (2016), bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi makanan bagi siswa sekolah dasar, balita, dan anak yang belum lahir, dan bukan untuk menggantikan konsumsi makanan utama (Ratnawati et al., 2023).

Program pemberian makanan tambahan dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi anak-anak, terutama di daerah-daerah di mana stunting lebih banyak terjadi. Tujuan program ini adalah untuk menurunkan angka stunting dengan memastikan asupan gizi yang tepat. Implementasi program ini melibatkan sejumlah mitra dan mengikuti proses metodis untuk menjamin keberhasilannya. Pemberian makanan tambahan merupakan cara lain untuk membantu anak-anak yang berisiko mengalami malnutrisi agar merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Desa Talaga Warna dipilih karena memiliki prevalensi stunting yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang cepat pada tahun 2023. Studi kasus ini ditempatkan secara strategis di dusun ini karena adanya perubahan prevalensi yang nyata yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan intervensi. Penelitian yang dilakukan di komunitas ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas program pemberian makanan tambahan dan menjadi contoh untuk penelitian yang dilakukan di tempat lain dengan masalah yang serupa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan yang alamiah (Sugiyono, 2017). Analisis dokumen dan metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data. Teori model implementasi Van Meter dan Van Horn, yang menjadi dasar penelitian ini, digunakan sebagai pedoman wawancara. Teori ini menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan, termasuk standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dan aktivitas pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Tajchan, 2006).

Wawancara dilakukan dengan para pemain kunci dalam program percepatan penurunan stunting, seperti sekretaris desa Talagawarna, Kepala Umum Bagian Kepegawaian, Kecamatan Pabuaran, dan Kepala UPT Puskesmas Pabuaran. Dalam investigasi ini, empat informan berpartisipasi. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan penelitian ini, dan orang yang terlibat program percepatan penurunan stunting di Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan variabel prevalensi stunting di Kabupaten Serang (Desa Talaga Warna). Data mengenai prevalensi stunting dikumpulkan melalui studi dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses terhadap teori dan konsep para ahli dalam rangka merumuskan teori dan menjelaskan temuan data dan fakta di lapangan yang diakhiri dengan pembahasan hasil penelitian (Riantsani, 2024). Masalah stunting ditangani dengan menggunakan pendekatan *Top-Down*, yang diciptakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Hal ini pada dasarnya dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Van

Metter dan Van Horn, terdapat enam faktor yang mempengaruhi seberapa baik implementasi kebijakan publik, antara lain:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Signifikansi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja kebijakan menentukan variabel ini. Van Meter dan van Horn berpendapat bahwa mengidentifikasi indikator kinerja merupakan langkah pertama yang penting dalam menganalisis penerapan kebijakan. Ukuran-ukuran kinerja ini mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan-tujuan fundamental dan tindakan-tindakan kebijakan. Menurut gagasan ini, tujuan dan ukuran kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan (Winarno, 2007).

Para pelaksana harus mengetahui semua kebijakan daerah dan federal yang berlaku agar dapat merespons kejadian stunting di Desa Talaga Warna dengan tepat. Dengan demikian, para pelaksana-khususnya pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Serang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan pencegahan stunting yang tentu saja berdampak pada produktivitas mereka yang bekerja di sana (Wiguna et al., 2022).

Berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Talaga Warna, Kepala Bagian Kepegawaian Kecamatan Pabuaran, dan Kepala UPT Puskesmas Pabuaran, tujuan dari adanya Implementasi Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk mencegah terjadinya stunting dari sedini mungkin dengan memberikan pemenuhan gizi seperti susu kepada ibu hamil terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu juga untuk menangani gizi buruk terhadap anak-anak di Desa Talaga Warna sehingga apabila terdapat anak-anak yang terindikasi gejala stunting dapat diberikan gizi tambahan dari program ini seperti telur, vitamin, susu, dan makanan bergizi lainnya. Di Kecamatan Pabuaran terdapat 50 posyandu, kader posyandu juga memberikan informasi mengenai bagaimana peran keluarga terhadap stunting dan bagaimana mereka memberikan makanan kepada anak-anak dan ibu hamil yang sesuai dengan kebutuhan gizinya. Program Pemberian Makan Tambahan

(PMT) ini disosialisasikan kepada masyarakat melalui kader posyandu di Desa Talaga Warna setiap bulan pada tanggal 18 dan 20 juni untuk mencatat dan mendata anak-anak yang memiliki gizi buruk dan juga ibu hamil yang ada di Desa Talaga Warna sehingga nantinya pemerintah akan memberikan dana sesuai dengan data yang ada.

Langkah-langkah kebijakan adalah cara untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Program pemberian makanan tambahan di Desa Talaga Warna merupakan salah satu dari inisiatif kebijakan ini, yang memiliki beberapa komponen penting. Pertama, inisiatif ini dirancang untuk memberi manfaat bagi 67 orang, di mana 15 di antaranya adalah ibu hamil dan 52 balita. Semua penerima manfaat ini telah mendapatkan makanan tambahan yang ditawarkan oleh program ini. Susu formula, telur, dan makanan bayi-yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan diet ibu hamil dan balita-adalah salah satu bentuk bantuan yang ditawarkan. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan diet kedua kelompok tersebut.

Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Desa Talaga Warna. Tujuan ini harus dapat diukur, tepat, dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk menurunkan jumlah awal 67 ibu hamil dan anak-anak yang mengalami stunting. Program ini dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka waktu tertentu, seperti satu tahun. Meningkatkan pola makan dan kesehatan penerima manfaat secara keseluruhan adalah tujuan lainnya. Melalui pemberian makanan tambahan, inisiatif ini bertujuan untuk menjamin kecukupan gizi bagi 15 ibu hamil dan 52 anak. Efektivitas program ini diukur dari perubahan status gizi ibu hamil dan anak-anak, yang tercermin dari penurunan prevalensi stunting dan peningkatan indikator kesehatan lainnya. Oleh karena itu, langkah kebijakan ini terdiri dari evaluasi terhadap jumlah penerima, jenis dukungan yang ditawarkan, dan pencapaian tujuan kebijakan dalam menurunkan stunting serta meningkatkan gizi dan kesehatan di Desa Talaga Warna.

Hal ini juga terjadi di beberapa daerah, seperti yang ada pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh (Vidianti & Ipah Ema Jumiaty, 2023) yang dimana dalam Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021 secara jelas menguraikan tujuan kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Serang. Tujuan-tujuan tersebut termasuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam upaya pencegahan stunting, meningkatkan kesadaran akan masalah ini di antara semua pihak pelaksana dan masyarakat, meningkatkan status gizi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Dan dalam penelitian ini tujuan tersebut sudah tercapai. Meskipun beberapa tujuan kebijakan telah tercapai, masih ada tantangan yang menghalangi pencapaian tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan dapat berhasil, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada saat ini sangatlah penting. Manusia adalah sumber daya yang paling penting untuk menjamin keberhasilan proses implementasi. Sumber daya mencakup semua komponen-komponen seperti finansial, manusia, dan material yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Besarnya dana akan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan diimplementasikan; namun, faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan adalah kurangnya dana atau insentif lainnya (Agustino, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara dari menurut Bapak Khaerudin sebagai Kepala Umum Bagian Kepegawaian di Desa Talaga Warna, dilihat dari aspek sumber finansial dari anggaran dana desa cukup atau tidak cukup itu relatif. Anggaran dana desa Talaga Warna bersifat terbatas namun dilihat dari skala prioritas Warga Desa Talaga Warna yang paling membutuhkan bantuan untuk warga yang kurang mampu. Berdasarkan data yang diberikan oleh SEKDES, Desa Talaga warna mengalokasikan dana desa sebesar Rp152.599.000 dalam bidang pembangunan desa untuk kegiatan khusus pencegahan stunting. Menurut Ida sebagai Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Pabuaran, dari segi

finansial yang memenuhi untuk melaksanakan program PMT yaitu anggaran dana desa yang berasal dari pusat. Desa Talaga Warna mengalami permasalahan yang sangat penting dari segi finansial yaitu dengan adanya kekurangan dana dari pusat pemerintahan kesehatan. Puskesmas melakukan tahap edukasi sesuai dengan kebutuhan warga Desa Talaga Warna yaitu tentang program Pemberian Makanan Tambahan yang disusun untuk upaya percepatan penurunan stunting. Ahmad Darul sebagai Sekretaris Daerah Desa Talaga Warna menyatakan bahwa finansial dari dana Desa Talaga Warna tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk megupayakan pelaksanaan program PMT. Desa Talaga Warna memiliki 10 orang kader posyandu yang ikut serta dalam pencegahan stunting yang terbagi menjadi 2 Pos yaitu Pos Mawar dan Pos Tanjung.

Tabel 3.1 Daftar Nama Kader Posyandu Desa Talaga Warna

No.	Nama Kader Posyandu Desa Talaga Warna	
	Pos Mawar	Pos Tanjung
1	Ade Santi	Umayah
2	Mulyanah	Iti Nurhayati
3	Siti Sulasih	Mamay Pebiyanti
4	Siti Mamnuah	Linawati
5	Ami	Mudrikah

Sumber : Kader Posyandu Talaga Warna

Desa Talaga Warna dalam program percepatan penurunan stunting melakukan upaya dengan Puskesmas atau desa melakukan suatu rutinitas pemeriksaan ibu hamil atau bayi yang ada dalam lingkungan Desa Talaga Warna. Kecamatan Pabuaran melakukan upaya lain untuk menghadapi permasalahan stunting yaitu adanya DaSat (dapur sehat). Menurut Sekretaris Desa Talaga Warna sumber daya material sudah melalui tahap penyampaian secara optimal namun pada dasarnya praxe yang dilakukan di Desa Talaga Warna masih kurang optimal. Sarana dan Prasarana yang disediakan di Desa Talaga Warna untuk mengadakan kegiatan posyandu yang di aula kantor desa. Semua rumah tangga ibu hamil di Desa Talaga Warna memiliki akses air minum yang aman dan jamban yang layak selama tiga

tahun berturut-turut, dengan persentase 100%. Jumlah rumah tangga ibu hamil yang tercatat adalah 14 pada tahun 2021, 3 pada tahun 2022, dan kembali menjadi 14 pada tahun 2023.

Gambar 3.1 Dokumentasi Penyerahan Telur dan Vitamin dari Kantor Desa kepada Masyarakat



Sumber: Kantor Desa Talaga Warna

Pada gambar 3.1 menunjukkan seorang petugas kader posyandu yang sedang memberikan telur dan suplemen gizi kepada warga untuk implementasi program pemberian makanan tambahan. Pendistribusian ini mencerminkan berbagai sumber daya yang berkontribusi terhadap keberhasilan program. Sumber daya finansial dapat dilihat dari penyediaan produk seperti telur dan suplemen gizi, yang mengindikasikan bahwa anggaran yang tersedia telah dialokasikan untuk membeli dan mendistribusikan bantuan.

Gambar 3.2 Dokumentasi Penyerahan Susu dan Vitamin Dari Kantor Desa Kepada Ibu Hamil



Sumber: Kepala Desa Talaga Warna

Pada gambar 3.2 menunjukkan seorang kader posyandu yang memberikan susu dan vitamin kepada Ibu hamil. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya kemanusiaan atau program bantuan sosial. Pendistribusian ini melibatkan berbagai sumber daya, terutama sumber daya manusia. Keterlibatan sumber daya ini menunjukkan ketekunan dari para petugas yang memastikan bahwa bantuan ini diberikan secara tepat.

Gambar 3.3 Dokumentasi Distribusi Bahan Makanan untuk Program PMT dari Kepala Desa Melalui Kader Posyandu



Sumber : Kepala Desa Talaga Warna

Gambar ini menggambarkan prosedur distribusi makanan tambahan di Desa Talaga Warna, yang merupakan salah satu komponen dari program pengurangan stunting. Produk makanan seperti telur, susu formula, dan makanan bayi adalah beberapa sumber daya material yang ditawarkan untuk memastikan anak-anak di desa tersebut mendapatkan makanan yang cukup. Keterlibatan sumber daya manusia, yang sangat signifikan dalam proses distribusi ini dan menunjukkan dukungan tenaga kerja yang terorganisir, adalah faktor lainnya. Adanya berbagai jenis bahan makanan yang didistribusikan menunjukkan bahwa ada dana yang dialokasikan untuk program ini, meskipun tidak terlihat secara langsung dalam gambar. Lokasi distribusi yang teratur dan bersih juga menunjukkan adanya infrastruktur dan logistik yang memadai, yang menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Dalam Penelitian terdahulu yang sudah ditulis oleh (Vidianti & Ipah Ema Jumiati, 2023) memberikan hasil bahwa Sumber daya seperti finansial, manusia, dan waktu sangat penting untuk pelaksanaan inisiatif yang efektif untuk mencegah stunting. Sumber daya keuangan diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan, ketiadaan sumber daya keuangan dapat berdampak pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Baik organisasi formal maupun informal termasuk dalam kategori ini karena memiliki ciri-ciri, norma, dan pola-pola interpersonal yang sama dalam implementasi kebijakan dan tidak dapat dipisahkan dari kerangka birokrasi. Jumlah agen yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan meningkat seiring

dengan meluasnya cakupan kebijakannya (Agustino, 2008; Winarno, 2007). Karakteristik agen pelaksana yang dibahas dalam penelitian ini terkait pihak-pihak yang terlibat, proses rekrutmen dan pelatihan untuk para kader.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, pihak-pihak yang terlibat dalam program ini adalah pemerintah, dinas kesehatan, puskesmas, kecamatan, kepala desa, kader posyandu, ahli gizi, tokoh agama serta masyarakat. Terkait proses rekrutmen dan pelatihan berdasarkan hasil wawancara dari Kepala UPT Puskesmas Pabuaran untuk pemilihan kader harus disesuaikan dengan Surat Keputusan yang berlaku. Untuk proses pelatihan berdasarkan informasi dari Kepala Umum Bagian Kepegawaian dilakukan sosialisasi sebagai bentuk pembekalan untuk para kader. Sehingga, para kader terpilih memiliki pemahaman dan kompetensi yang cukup mengenai gizi yang diperlukan untuk bayi. Di desa Talaga Warna para kader terpilih selalu diberikan *reward* oleh kepala desa atas tugas yang mereka lakukan sebesar Rp. 100.000 (Udzrotu Shauma & Gandini Purbaningrum, 2022).

Gambar 3.3 Dokumentasi Penimbangan Balita di Kantor Desa Talaga Warna



Sumber: Kepala Desa Talaga Warna

Dapat dilihat pada gambar 3.3 yang menunjukkan keiatan penimbangan balita yang melibatkan masyarakat setempat, yang mencerminkan katakarakteristik agen pelaksana seperti yang dijelaskan oleh teori Van Meter Van Horn. Petugas kesehatan atau kader posyandu yang terlibat menunjukkan kompetensi dan keterampilan dalam mengoperasikan peralatan penimbangan, yang mengindikasikan adanya pelatihan yang memadai. Kehadiran mereka dilapangan menunjukkan komitmen

dan dedikasi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.4 Dokumentasi Pengukuran Tinggi Badan Balita di Kantor Desa Talaga Warna



Sumber: Kepala Desa Talaga Warna

Pada gambar 3.4 menggambarkan kegiatan petugas kesehatan atau kader yang sedang mengukur tinggi badan balita, menunjukkan keterampilan dan pemahaman yang baik dalam menjalankan prosedur. Memiliki akses terhadap peralatan yang diperlukan dan bekerja sama dengan orang tua anak, menunjukkan koordinasi yang sangat baik. Komunikasi yang efektif dengan anak-anak dan orang tua meningkatkan kepercayaan dan memastikan proses pengukuran yang tertib.

Kepemilikan jaminan kesehatan di kalangan ibu hamil di Desa Talaga Warna bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 dan 2023, 75% ibu hamil memiliki jaminan kesehatan, dengan jumlah masing-masing 6 dan 40 orang. Pada tahun 2022, semua ibu hamil (100%) memiliki jaminan kesehatan, namun jumlahnya hanya 2 orang.

Dalam sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh (Udzrotu Shauma & Gandini Purbaningrum, 2022) menyebutkan percepatan program pencegahan stunting telah dilaksanakan dengan cukup baik, dengan melibatkan berbagai sektor. Hal ini termasuk dalam hal pembagian kewenangan. Di setiap OPD telah dilakukan pengawasan sebagai bagian dari percepatan kebijakan pencegahan stunting yang komprehensif. Kebijakan percepatan pencegahan stunting telah diimplementasikan di setiap OPD, disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang sering dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh Tim Koordinasi dan Tim Konvergensi untuk

mempercepat pencegahan dan penurunan stunting.

Komunikasi Antar Organisasi

Manajemen program yang efektif membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang sangat baik. Hal ini akan memungkinkan para pejabat senior untuk memotivasi para pelaksana agar berperilaku sesuai dengan tujuan kebijakan. Ada dua kategori kegiatan implementasi dalam hubungan antar pemerintah atau antar organisasi. Pertama, bimbingan dan dukungan teknis dapat diberikan. Kedua, berbagai hukuman atau sanksi, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, dapat diberikan oleh atasan (Winarno, 2007).

Pak Khaerudin sebagai Kepala Umum Bagian Kepegawaian menerangkan bahwa koordinasi antar *stakeholder* yang bertanggung jawab terhadap Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) sudah baik hal ini dibuktikan dengan adanya rapat antara mustika yang dilakukan setiap tiga kali dalam sebulan yang dimana rapat tersebut dihadiri oleh Kepala kecamatan Pabuaran, Kepala Puskesmas Pabuaran, Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Pabuaran, Kepala Desa di Pabuaran, Tokoh Agama, serta perwakilan dari masyarakat sipil di Kecamatan Pabuaran. Implementasi Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) di Desa Talaga Warna dikordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran, Puskesmas Pabuaran, Desa Talaga Warna, dan Posyandu.

Pak Darul sebagai Sekretaris Desa Talaga Warna juga menerangkan bahwa memang adanya rapat antara para *stakeholder* yang terlibat salah satunya rapat pembuatan rencana kerja yang dilakukan setahun sekali di bulan juni yang dihadiri oleh Kader Posyandu, Kepala Desa Talaga Warna, ahli gizi dari Puskesmas Pabuaran dan warga Desa Talaga Warna. Dalam hal ini orang yang terlibat dalam Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) saling bersinergi untuk menurunkan stunting di Desa Talaga Warna. Walaupun koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* sudah baik tetapi pernah terjadi miskomunikasi di Desa Talaga

Warna antara Bidan dengan Kader Posyandu yaitu terjadinya kesalahan data yang terjadi antara tahun 2022 atau 2023.

Gambar 3.5 Rapat Mingguan di Kecamatan Pabuaran



Sumber: Kecamatan Pabuaran

Pada gambar 3.5 menunjukkan bahwa adanya komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti anggota BPD, Kepala Desa, dan Camat. Sangat penting bagi para pemangku kepentingan ini untuk berkomunikasi secara efektif untuk menjamin implementasi lapangan yang tepat dari kebijakan yang telah direncanakan. Forum ini menyediakan tempat untuk pertukaran informasi, pembahasan masalah-masalah penting, dan kesepakatan atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh jurnal penelitian yang telah ditulis oleh (Vidianti & Ipah Ema Jumiati, 2023) yang dimana komunikasi antar organisasinya sudah terlaksanakan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan strategi pencegahan stunting bergantung pada komunikasi yang efektif antara berbagai entitas dan kegiatan yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan yang mudah dibantu oleh kerja sama yang baik di antara para pelaksana di tingkat kabupaten, puskesmas, dan desa.

Sikap dan Kecenderungan Implementor

Sikap para pelaksana memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja implementasi karena resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan tercipta ketika kebijakan tersebut tidak selaras dengan kebutuhan, keinginan, atau masalah yang ingin diselesaikan oleh warga negara. Memahami tujuan dan isi kebijakan, serta tindakan yang tepat dalam menerima, netral, atau menolak kebijakan, semuanya dapat

dianggap sebagai aspek sikap pelaksana. Pemahaman pelaksana dan tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan yang ada merupakan dua kategori yang menjadi indikator sikap pelaksana dalam studi ini (Agustino, 2008; Winarno, 2007).

Berdasarkan paparan dari Kepala Bagian Kepegawaian Kecamatan Pabuaran, sikap dari para anggota yang terlibat Program ini sudah baik karena permasalahan stunting memerlukan atensi khusus dan sangat wajib untuk dilaksanakan karena merupakan program nasional. Hal ini juga diterangkan oleh Sekretaris Desa Talaga Warna bahwa para pelaksana sudah memiliki sikap yang sesuai dengan arahan dan tujuan Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) sehingga tidak adanya penyelewengan penugasan. Walaupun sikap para pelaksana program PMT ini sudah baik tetapi terdapat kendala dalam Implementasi Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) yaitu makanan yang seharusnya diberikan untuk memenuhi gizi anak-anak maupun ibu hamil seperti vitamin, susu, dan telur justru tidak dikonsumsi secara tepat sasaran yaitu anak-anak ataupun ibu hamil melainkan oleh anggota keluarganya yang sudah dewasa dan tidak menjadi sasaran program ini.

Gambar 3.6 Dokumentasi Pengukuran Tinggi Badan Ibu Hamil di Kantor Desa Talaga Warna



Sumber: Kepala Desa Talaga Warna

Pada gambar 3.6 menunjukkan seorang petugas kesehatan sedang mengukur tinggi badan dari seorang Ibu hamil. Tindakan dan kehadiran dari petugas ini memperlihatkan ketekunan dan kepedulian mereka terhadap masyarakat umum. Petugas yang memiliki komitmen tinggi akan menjalankan tugasnya secara tekun dan akurat. Sikap dan bahasa tubuh dari para petugas menunjukkan keramahan

mereka kepada masyarakat sehingga hal ini dapat membangun hubungan baik antara petugas dengan masyarakat. Partisipasi aktif petugas dalam pengukuran tinggi badan ini memperlihatkan bahwa petugas tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, namun juga menjadi pelaksana.

Perilaku ibu hamil di Desa Talaga Warna dalam melakukan pemeriksaan kehamilan 4 kali selama masa kehamilan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 dan 2023 dengan persentase 100% dari 14 ibu hamil pada tahun 2021 dan 15 ibu hamil pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dengan hanya 67% dari 2 ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan 4 kali. Selain itu, kepatuhan ibu hamil di Desa Talaga Warna dalam mendapatkan dan meminum pil PE selama 90 hari sangat tinggi pada tahun 2021 dan 2023, dengan persentase 100% dari 14 ibu hamil pada tahun 2021 dan 15 ibu hamil pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2022, kepatuhan menurun, dengan hanya 67% dari 2 ibu hamil yang meminum pil PE selama 90 hari. Layanan pemeriksaan nifas 3 kali bagi ibu bersalin di Desa Talaga Warna menunjukkan tingkat kepatuhan yang konsisten pada tahun 2021 dan 2023, dengan 75% ibu bersalin mengikuti pemeriksaan nifas, yaitu 6 ibu pada tahun 2021 dan 12 ibu pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2022, tidak ada ibu bersalin sehingga tidak ada yang mengikuti pemeriksaan nifas. Semua rumah tangga ibu hamil di Desa Talaga Warna memiliki akses air minum yang aman dan jamban yang layak selama tiga tahun berturut-turut, dengan persentase 100%. Jumlah rumah tangga ibu hamil yang tercatat adalah 14 pada tahun 2021, 3 pada tahun 2022, dan kembali menjadi 14 pada tahun 2023. Hal-hal tersebut mempengaruhi Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Talaga Warna.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Vidianti & Ipah Ema Jumiati, 2023) mengungkap bahwa dari perencanaan hingga evaluasi, pengetahuan dan dedikasi para pelaksana terhadap kebijakan pencegahan stunting telah meningkat dan keberhasilan

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana yang baik.

Kondisi Lingkungan

Proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Implementasi kebijakan yang berhasil akan terhambat jika lingkungan sosial, politik, dan ekonomi tidak mendukung. Akibatnya, arah kebijakan sangatlah dipengaruhi oleh dunia luar (Agustino, 2008).

Menurut Kepala Bagian Kepegawaian Kecamatan Pabuaran, kondisi sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dari orang tua balita sendiri, karena kondisi ekonomi yang kurang membuat orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk anak-anaknya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Puskesmas Pabuaran, di Desa Talaga Warna kondisi stunting dipengaruhi juga oleh perilaku masyarakat dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting bahwa sebagian masyarakat masih menolak untuk melaksanakan imunisasi dan vaksin, tetapi untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) mereka menerimanya dengan antusias. Hal tersebut terjadi karena adanya persepsi yang berbeda tentang manfaat dan resiko imunisasi dan vaksinasi serta pemberian makanan tambahan bisa dipengaruhi oleh kepercayaan, budaya, dan pengalaman sebelumnya sehingga hal ini mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program-program kesehatan yang ada. Sedangkan menurut Sekertaris Desa Talaga Warna, anak-anak yang terkena stunting bukan hanya disebabkan karena kekurangan gizi dan faktor ekonomi saja, namun bisa terjadi juga karena adanya faktor keturunan.

Terkait dengan kondisi lingkungan tersebut sudah pernah disebutkan oleh (Udzrotu Shauma & Gandini Purbaningrum, 2022) bahwa rata-rata tingkat pendidikan orang tua dari anak stunting tergolong rendah, seperti yang ditunjukkan oleh data Posyandu di Kecamatan Rajeg. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah tingkat pendidikannya oleh karena itu sangat mungkin anak mengalami stunting jika ketidaktahuan orang tua dikombinasikan

dengan pola asuh yang buruk. Di Kecamatan Rajeg, anak-anak yang mengalami stunting umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena tingkat ekonomi atau pendapatan keluarga rendah ini sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga di lingkungan berpenghasilan rendah, terutama dalam hal asupan makanan bergizi untuk anaknya.

4. KESIMPULAN

Dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Varn Horn, yang memiliki enam variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap dan kecenderungan pelaksana, dan kondisi lingkungan. Studi ini mengkaji implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mencegah stunting di Desa Talaga Warna. Karena strategi ini telah berhasil menurunkan angka stunting di Desa Talaga Warna dan memenuhi keenam kriteria tersebut, maka Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan untuk pencegahan stunting ini dapat dikatakan efektif dan baik dalam mencapai tujuan kebijakan.

Hal ini dipengaruhi oleh fakta bahwa orang yang melaksanakan kebijakan atau bekerja untuk program ini mampu memahami tujuan dan arah kebijakan terkait, serta mampu memanfaatkan sumber daya keuangan, manusia, dan sumber daya material lain yang tersedia untuk tujuan pencegahan stunting, dan menjaga koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara *stakeholder*, selain itu para pelaksana juga mampu menghadapi tantangan yang ada baik dari faktor sosial, ekonomi, dan politik pada saat menjalankan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

5. REFERENSI

Achadi, E. L., Thaha, A. R., Achadi, A., Syam, F. A., & Setiarini, A. (2020). *Pencegahan Stunting Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kehidupan* (1st ed.). Rajawali Pers.

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). ALFABETA, cv.

Fikawati, S., Syafiq, A., & Veratamala, A. (2017). *Gizi Anak dan Remaja* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Hariyanti, Migumi, A., Pasaribu, D. S., Br. Karo-karo, E. K. A., Anugerah, H., Algifari, M. F., Mahmudah, N., & Syartika, R. (2022). Penguatan Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di Desa Tandun Barat Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 5094–5101.

Ratnawati, M., Probawati, R., Sawitri Prihatini, M., Ningtyas, S. F., & Ulfa, A. F. (2023). Pemberian Makanan Tambahan Modifikasi Terhadap Status Gizi Balita. *Jurnal Health Sains*, 4(2), 104–111. <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i2.801>

Riantsani, N. H. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA (Studi di Wilayah Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(02).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (1st ed.). ALFABETA, cv.

Tajchan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). AIPI Bandung.

Udzrotu Shauma, N., & Gandini Purbaningrum, D. (2022). IMPLEMENTATION OF INTEGRATED STUNTING PREVENTION POLICY. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 13, Issue 2). <https://jkip.ejournal.unri.ac.idhttps://jkip.ejournal.unri.ac.id>

Vidianti, S. R., & Ipah Ema Jumiati. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 213–232. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.150>

Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 28–37.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* (1st ed.). Media Pressindo.